

## Kepemimpinan dan Kebijakan Politik Islam dalam Konteks KeIndonesiaan

**Rahmatul Akbar<sup>1)\*</sup>, Jailani Ahmad<sup>2)</sup>, Habib Al Rasyid<sup>3)</sup>**

<sup>1,2,3)\*</sup> Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

email: [rahmatul.akbar@ar-raniry.ac.id](mailto:rahmatul.akbar@ar-raniry.ac.id)

### Abstrak

Artikel ini membahas aspek ideal sebuah konsep kepemimpinan dalam sebuah negara khususnya implikasi dalam konteks Indonesia. Indonesia yang diklaim sebagai Negara dengan kependudukan Islam yang besar namun belum mencerminkan ruh Islam yang sebenarnya. Maka dari itu perlu adanya kajian serta perincian bagaimana Indonesia sebenarnya dalam perkembangan politiknya sehingga Indonesia tidak mengambang dalam mencerminkan Islam yang sebenarnya. Pancasila yang menjadi Ideologi negara masih banyak dipertentangkan oleh berbagai pihak yang sudah jelas bahwa pancasila itu sebagai ideologi bangsa Indonesia. Penelitian ini merupakan kajian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) yang kemudian dianalisis dengan content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam masih dapat dirasakan dalam implementasi masyarakat secara umum di Indonesia baik dalam aspek ibadah, maupun aspek muamalah. Ini menandakan Indonesia masih dalam bingkai keIslaman yang baik dan benar. Harus ada upaya saling menerima dan memahami setiap situasi yang terjadi dewasa ini. sikap toleransi dan juga prinsip pluralisme harus bisa berjalan di Indonesia sehingga potensi perselisihan karena sebuah perbedaan bisa diatasi dalam ranah musyawarah dengan mengedepannya jiwa toleransi dan saling menghargai terhadap perbedaan yang muncul. Keberagaman pemikiran tiap masyarakat serta sikap yang terkadang dapat di politisasi oleh pihak lain menjadi sebuah tantangan sendiri dalam menjawab problema kebijakan politik di Indonesia. Memandang Indonesia sekarang haruslah kearah positif yang harus mampu membangun segala sendi-sendi utama sebagai negara baik aspek pendidikan, agama, budaya serta ekonomi untuk menunjang memakmurkan serta kesejahteraan di Indonesia.

Kata Kunci: Kepemimpinan; kebijakan Politik; Indonesia

### Abstract

*This article discusses the ideal aspects of a leadership concept in a country, especially its implications in the Indonesian context. Indonesia, which is claimed as a country with a large Islamic population, does not yet reflect the true spirit of Islam. Therefore, it is necessary to study and detail how Indonesia actually develops in its political development so that Indonesia does not float in reflecting the true Islam. Pancasila, which is the state ideology, is still widely opposed by various parties who are clear that Pancasila is the ideology of the Indonesian nation. This research is a qualitative study with a type of library research which is then analyzed with content analysis. The results of the study show that Islam can still be felt in the implementation of society in general in Indonesia, both in the aspect of worship and the aspect of muamalah. This indicates that Indonesia is still in the frame of good and correct Islam. There must be an effort to accept and understand each other in every situation that occurs today. The attitude of tolerance and also the principle of pluralism must be able to run in Indonesia so that the potential for disputes due to differences can be overcome in the realm of deliberation by prioritizing the spirit of tolerance and mutual respect for differences that arise. The diversity of thoughts of each community and attitudes that can sometimes be politicized by other parties are a challenge in answering political policy problems in Indonesia. Looking at Indonesia now must be in a positive direction that must be able to build all the main joints as a country, both*

*educational, religious, cultural and economic aspects to promote prosperity and prosperity in Indonesia.*

**Keywords:** *Leadership; Political policy; Indonesia*

## PENDAHULUAN

Manusia adalah salah satu dari makhluk yang Allah ciptakan. Manusia yang Allah ciptakan bukan tidak memiliki kepentingan dan tujuan yang pasti. Manusia menempatkan diri sebagai makhluk Allah yang sempurna. Dalam artian bahwa manusia ini bisa berada diatas makhluk lain dan juga bisa berada di bawah dari makhluk yang lain. Selain itu Allah juga menjadikan manusia ini sebagai makhluk yang beribadah kepada-Nya (Q.S. Adz-Dzariyat (51): 56) sehingga menampakkan kekuasaan Allah itu diatas segala-galanya. Dalam proses penciptaan manusia, malaikat melihat manusia itu sebagai makhluk yang akan membuat kerusakan di muka bumi jika diangkat sebagai khalifah. (Q.S Surat Al-Baqarah (2): 30). Allah juga sangat mewanti-wanti serta senantiasa memperingatkan manusia untuk tidak membuat kerusakan di muka bumi dan senantiasa untuk selalu berbuat baik (Q.S. Al-Qashash (28): 77)

Allah menjadikan manusia ini makhluk yang membutuhkan kepada orang lain. Manusia ini sebagai makhluk sosial yang butuh kepada intraksi dengan makhluk yang lain sehingga Allah menjadikan manusia ini dari golongan laki-laki dan perempuan sehingga bisa menjadi sebuah masyarakat dalam membangun relasi atau hubungan yang baik dengan adanya upaya saling kenal-mengenal. (Q.S. Al-Hujurat (49): 13). Sebagai makhluk sosial, interaksi dan komunikasi juga berlaku dalam masyarakat. Ini yang menjadi upaya saling mempengaruhi dan saling menukar pesan sehingga tercapai tujuan masing-masing. Upaya politik inilah yang selalu ada dalam masyarakat sehingga mampu untuk merumuskan suatu kesatuan dalam masyarakat yang disebut dengan Negara. Masyarakat biasanya terdiri dari kemajmukan dan keberagaman sehingga harus adanya sikap yang toleransi dalam melihat itu sehingga mampu membangun sebuah dimensi yang baik dari perbedaan-perbedaan yang ada. Perbedaan sudah menjadi suatu hal yang wajar dalam sebuah masyarakat namun tidak untuk melahirkan sebuah pertentangan, sebaliknya perbedaan itu harus mengantarkan kepada kerja sama yang menguntungkan semua pihak. (M. Quraish Shihab, 2005: 125) Islam yang merupakan agama yang sempurna terkadang dipisahkan dalam konteks negara yang pada dasarnya Islam mengatur semua masalah negara. Politik dalam sebuah negara sangatlah menentukan kebijakan yang ada dalam sebuah negara. Dalam pandangan Fazlul Rahman, antara agama dan politik tidak dapat dipisahkan. (M. Hasbi Amiruddin, 2000: 78) Secara historis, hubungan politik di Indonesia antara konsepsi negara dengan politik Islam sudah lama mengalami jalan buntu. Sejak dimulainya pemerintahan Soekarno sampai pada masa Soeharto. Di mana politik Islam dipandang sebagai kekuasaan yang potensial yang dapat merobohkan landasan negara yang nasionalis. (Afifi, Abdullah A, and Afifi Fauzi Abbas. 2023: 1-27) Jika melihat aspek Indonesia sekarang, maka perlu pemahaman yang lebih rinci serta perkembangan wawasan kebangsaan terhadap dinamika Indonesia sebenarnya. Indonesia yang diklaim sebagai Negara dengan kependudukan Islam yang besar namun belum mencerminkan ruh Islam yang sebenarnya. Maka dari itu perlu adanya kajian serta perincian bagaimana Indonesia sebenarnya dalam perkembangan politiknya sehingga Indonesia tidak mengambang dalam mencerminkan Islam yang sebenarnya. Pancasila yang menjadi Ideologi negara masih banyak dipertentangkan oleh berbagai pihak yang sudah jelas bahwa pancasila itu sebagai ideologi bangsa Indonesia. Kekhawatiran muncul terhadap pancasila yang dianggap tidak mencerminkan Islam. Namun secara sekilas semua sila dalam pancasila mencerminkan wajah ajaran Islam di dalamnya. Sebenarnya pancasila sudah tercermin wajah Indonesia yang sebenarnya namun kepentingan politik serta kebijakan politik yang dimunculkan terkadang melahirkan pemahaman berbeda dalam melihat pancasila sendiri. Proses demokrasi yang dianut Indonesia juga masih memiliki celah ketidakjujuran dalam melahirkan sosok pemimpin yang baik serta kurangnya kestabilan politik dalam konsep Islam yang sebenarnya. Yang lebih parahnya lagi Partai politik yang

berlandaskan Islam pun tidak mencerminkan makna Islam yang sebenarnya sehingga masyarakat menjadi buta terhadap konsep politik Islam yang sebenarnya. Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka perlu adanya pemahaman kepemimpinan dalam Islam, kebijakan politik dalam Islam serta aspek kepemimpinan dan kebijakan politik dalam bingkai KeIndonesiaan serta Islam dan Pancasila.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan kajian kualitatif yaitu Penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono: 2021). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. (Mahmud, 2011: 31). Penulis mencoba mengumpulkan beberapa konsep yang kemudian dianalisis dengan cara menggambarkan kembali konseptual yang ada dan kemudian penulis analisis dengan (content analysis) yang berhubungan dengan komunikasi atau isi komunikasi. (Burhan bungin, 2007: 230).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kepemimpinan dalam Islam**

Secara umum pemahaman serta kajian tentang kepemimpinan dalam Islam sudah sangat banyak disinggung dalam beberapa literature-literatur serta banyak para ahli yang membahas tentang hal ini. Menjadi sangat menarik untuk bisa menggambarkan kepemimpinan dalam Islam terutama untuk pokok kajian yang berkaitan dengan seorang yang layak dalam perspektif Islam. Perumusan kepemimpinan sudah ada sejak manusia pertama kali diciptakan oleh Allah yaitu Nabi Adam. Ini menjadi awal dari perumusan kepemimpinan baik dalam kategori pandangan Islam maupun bukan. Terkait dengan hal tersebut maka akan sedikit menarik untuk melihat aspek-aspek apa saja dalam sebuah kepemimpinan tersebut terutama dalam pandangan Islam sendiri.

Pemimpin menjadi orang yang sangat bertanggung jawab terhadap apa yang dia pimpin. Ini menjadi peringatan bahwa pemimpin itu bukan sekedar orang yang paham satu bidang saja, namun secara keseluruhan memahami tanggung jawab yang di embannya. Pemimpin bukan terlahir begitu saja namun juga seorang pemimpin itu terbentuk sebagai pribadi yang baik serta memiliki suatu aura kepemimpinan dalam dirinya.

Menurut Ibnu Taimiyyah, seorang pemimpin atau kepala negara Islam itu hanya harus memiliki dua syarat, yaitu: (1) Memiliki kejujuran atau dapat dipercaya (*Amanah*), dan (2) memiliki kekuatan atau kecakapan (*Quwwah*). Ibnu Taimiyyah memaparkan kedua syarat ini karena di dasarkan pada dua Ayat Al-Quran surat Al-Qashash ayat 26 dan surat Yusuf ayat 54. (Mujar Ibnu Syarif dan Khamani Zada, 2007: 271-272) Menurut Munawir Sjadzali, pernyataan Ibnu Taimiyyah tersebut dapat ditafsirkan bahwa kepada negara yang adil meskipun tidak beragama Islam itu lebih baik daripada kepala negara yang tidak adil meskipun beragama Islam. (Munawir Sjadzali, 1993: 89-90)

Selain gambaran tersebut dalam pandangan al-Maududi, seorang pemimpin negara itu harus memiliki beberapa ketentuan, diantaranya; 1) Beragama Islam (*should be a muslim*); 2) Harus seorang laki-laki (*should be a male*); 3) Dewasa (*should be adult*); 4) Sehat fisik dan mental (*should be sane*); 5) Warga negara Islam (*should be a citizen of the Islamic state*) yang terbaik, shaleh yang kuat komitmennya kepada Islam. (Mujar Ibnu Syarif dan Khamani Zada, 2007: 276)

Dari pendapat yang ada, maka aspek kepemimpinan dalam Islam sebenarnya mendapat perhatian khusus baik dari kalangan ahli maupun dari pada ulama dan ilmuan terdahulu. Ini tergambar jelas dengan banyaknya ketentuan yang muncul serta kriteria pemimpin yang

terbaik yang dapat memimpin negara Islam dengan konsep Islam yang sebenarnya. Kepemimpinan dalam Islam bukanlah hal yang baru untuk dikaji karena begitu banyak literature dan gagasan yang ada sejak dulu dan berkembang sampai sekarang sehingga banyaknya implementasi dalam masyarakat Islam dengan berbagai corak kepemimpinan yang pernah ada.

### **Kebijakan Politik dalam Islam**

Islam merupakan sebuah agama yang komprehensif dan terjabarkan semuanya dalam Al-Quran dan Hadits, baik dari kebijakan berkaitan dengan Allah maupun kebijakan yang berkaitan dengan manusia. Politik juga tidak luput dari kajian Al-Quran sebab Rasulullah SAW merupakan icon dari Islam sendiri yang mencoba memaparkan isi dari Al-Quran serta menjadi contoh yang baik bagi manusia yang lain. (Q. S. Al- Ahzab (33): 21) Jika dilihat aspek sejarah, Nabi tidak hanya bertindak sebagai seorang pembawa risalah namun juga sebagai sosok pemimpin masyarakat yang majmuk. Dari beberapa sarjana orientalis meyakini bahwa ajaran Islam bukan semata-mata agama tetapi juga mengatur masalah-masalah negara. (H. A. Djazuli, 2009: 80) Dari beberapa orientalis tersebut misalnya, C.A.Nollino Menyatakan, "Muhammad telah meletakkan dasar agama dan negara dan agama pada waktu yang sama. H.R. Gibb, menyatakan," Pada waktu itu menjadi jelas bahwa Islam bukan semata-mata aqidah agama yang individual sifatnya, tetapi juga mewajibkan mendirikan masyarakat yang mempunyai Uslub-uslub tertentu di dalam pemerintahan dan mempunyai undang-undang aturan-aturan yang khusus. (Muhammad Yusuf Musa, tt: 19)

Peristiwa hijrah nabi ke Madinah boleh jadi sebagai kebijakan politik yang nabi lakukan serta membangun persaudaraan diantara kaum Muhajirin dan kaum Anshar. Dalam pandangan Nurcholis Madjid, Nabi telah membangun sebuah tatanan sosial-politik yang sangat modern padahai ini jauh dari perkembangan pemahaman modern yang terjadi. Piagam Madinah menjadi sebuah rumusan tentang prinsip kesepakatan kaum muslimin di Madinah di bawah Rasulullah dengan berbagai kelompok bukan muslim di Madinah untuk membangun masyarakat politik bersama. (Nurcholish Madjid, 1999: xix)

Sebuah pemerintahan, maka harus adanya suatu hal yang mengatur, maka politik mengambil porsi tersendiri dalam mengatur suatu pemerintahan serta mengawasi dan menjalankan suatu pemerintahan dengan baik. Jika melihat definisi dari politik sendiri, biasanya kata politik diterjemahkan dengan kata *Siyasah*, kata ini diambil dari akar kata *sasa-yasusu* yang biasa di artikan mengemudi, mengendalikan, mengatur, dan sebagainya. (M. Quraish Shihab, 2005: 416)

Jika dilihat lebih teliti, maka kebijakan politik dalam Islam sangat mempengaruhi perkembangan keilmuan serta aliran-aliran keagamaan dalam Islam sendiri. Setelah Wafatnya Nabi Muhammad SAW, maka mulai timbul benih-benih pertikaian dan juga perpecahan dalam tubuh Islam. Ini disebabkan karena politik yang mulai dijalankan oleh beberapa pihak. Posisi Nabi sebagai pemimpin agama dan juga pemimpin negara menjadi daya tarik sendiri untuk di perebutkan terlebih karakter masyarakat arab yang keras serta sangat mudah terprovokasi untuk bertikai. Ini dapat dikatakan sebagai awal dari perpecahan tersebut walaupun Abu Bakar dan Umar bin Khatab dapat meredamnya.

Kebijakan politik dalam pandangan Al-Ghazali suatu keharusan bagi para penguasa memahami tugas dan tanggung jawabnya serta menyadari dirinya adalah bagian dari rakyat, mengutamakan pelayanan untuk masyarakatnya serta hal yang sangat penting adalah membina hubungan baik dan cinta kasih dengan rakyat, serta tindakan yang tidak bertentangan dengan jiwa syariat. (J. Suyuthi Pulungan, 1997: 272) Kebijakan politik yang berlandaskan hal tersebut bisa menjadi pegangan yang baik dalam membangun suatu landasan kerja yang baik untuk sebuah pemerintahan yang baik terlebih jika Islam selalu

berada pada poros depan sebagai modal serta petunjuk utama dalam membuat kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat.

### **Kepemimpinan dan kebijakan Politik Islam dalam Konteks KeIndonesiaan**

Secara umum Indonesia dikenal sebagai negara yang mayoritas penduduknya Islam sehingga mencerminkan Indonesia sebagai sebuah negara Islam. Jika dilihat lebih spesifik, Indonesia pernah menjadi sebuah negara diktator yang dipimpin selama 30 tahun oleh seorang pemimpin serta berubah menjadi sebuah negara demokrasi yang mengusung semua berada di tangan rakyat. Ini menjadi fase perjalanan panjang sejarah berdirinya negara Indonesia. Jika melihat sejarah lebih lama, sebelum adanya Indonesia, wilayah Indonesia merupakan kumpulan dari beberapa kerajaan baik hindu dan budha serta kerajaan Islam yang tercatat rapi dalam sejarah Nusantara.

Seiring dengan datangnya Belanda untuk menjajah Indonesia, maka semua system kerajaan itu hilang dan menjadi negara republik dengan konsep demokrasi. Ini yang bisa dirasakan sampai sekarang ini serta berbagai warna pun muncul dari Indonesia sekarang ini, baik dari segi kepemimpinan dan juga politik. Jika dilihat lebih dalam, system politik di Indonesia menjadi daya tarik sendiri untuk dikaji sebab proses politik di Indonesia terkadang tergambar keras, keruh, dan juga bisa menjadi kotor. Dalam analisa penulis, kondisi ini sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa sebab dengan konsep politik yang baik dan sehat maka bisa jadi kondisi Indonesia tidaklah serumit sekarang terutama permasalahan utama seperti korupsi dan narkoba.

Sebuah negara seperti Indonesia terdapat sebuah kepemimpinan yang menjadi perwakilan dari terselenggaranya suatu negara. Baik kepemimpinan itu dari kalangan tokoh politik, pemimpin partai bahkan puncak pemimpin militer yang terkadang tidak begitu stabil dalam sebuah kepemimpinannya. Kepemimpinan politik di Indonesia dari sejarah, budaya dan harapan-harapan masyarakat. Ada dua hal yang menjadi cara berfikir politik orang Indonesia menurut Kuntowijoyo. *Pertama*, Gagasan tentang kekuasaan; *Kedua*, gagasan tentang Nilai. (Kuntowijoyo, 1999: 186)

Melihat kontek KeIndonesiaan sekarang ini, perlu adanya beberapa hal utama yang sebenarnya sudah ada. Penulis mencoba mengutip pendapat Djazuli tentang dasar-dasar atau landasan utama dalam melihat konsep politik yang baik. *Pertama*, Kesatuan Umat manusia, *Kedua*, Keadilan, *Ketiga*, Persamaan, *Keempat*, kehormatan manusia, *Kelima*, Toleransi, *Keenam*, Kerjasama kemanusiaan, *Ketujuh*, Kebebasan dan kemerdekaan, *Kedelapan*, Perilaku moral yang baik. (H. A. Djazuli, 2013: 122-131)

Sejarah pembentukan negara Indonesia sangatlah dramatis. Dalam artian bahwa kemerdekaan Indonesia diperoleh setelah Jepang yang menjajah Indonesia menyerah karena serangan bom atom Hiroshima serta proses yang begitu cepat serta tantangan kembali datang dari Belanda yang mencoba mengusik kembali kemerdekaan itu serta mencoba mengadudomba masyarakat Indonesia untuk bisa mengusik kemerdekaan yang ada. Polemik Indonesia setelah merdeka juga semakin rumit dengan munculnya pemberontakan dari daerah-daerah yang merasa dikhianati oleh pusat pemerintahan. Ini menjadi tantangan besar di Indonesia sehingga sangat menguras tenaga dan emosi, baik itu dari kalangan pemerintah maupun masyarakat sendiri.

Islam masih bisa dirasakan dalam implementasi masyarakat secara umum di Indonesia baik dalam aspek ibadah, maupun aspek muamalah. Ini tergambar jelas di Indonesia dengan keberadaan hukum yang sesuai dengan konteks keIslaman secara umum. Ini menandakan Indonesia masih dalam bingkai keIslaman yang baik dan benar. Indonesia sebagai bangsa yang banyak penganut dari Islam menjadikan corak Islam yang begitu jelas, namun tidak ada keberanian yang secara nyata untuk pengimplementasian Islam secara menyeluruh.

Masih terdapat penyimpangan yang bisa dikatakan sangat parah dengan menjadikan agama sebagai nilai jual. Dalam pandangan Ahmad Syafi'i Maarif, Indonesia adalah sebuah bangsa yang mengakui beragama, tetapi setiap hari dan setiap malam nilai-nilai luhur agama itu di injak dan diperkosa dengan dipayungi oleh berbagai pembenaran teologis dan kutipan sacral. (Ahmad Syafi'i Maarif, 2009: 30) Ini menjadi problem yang sangat parah yang terjadi di Indonesia sekarang ini. Mengatasnamakan agama untuk mencari keuntungan pribadi menjadi hal yang sangat tabu untuk dilakukan. Inilah yang menjadi gambaran kekinian Indonesia sekarang dalam konteks agama.

Harus ada upaya saling menerima dan memahami setiap situasi yang terjadi dewasa ini. sikap toleransi dan juga prinsip pluralisme harus bisa berjalan di Indonesia sehingga potensi perselisihan karena sebuah perbedaan bisa diatasi dalam ranah musyawarah dengan mengedepannya jiwa toleransi dan saling menghargai terhadap perbedaan yang muncul. Jika berbicara Indonesia bukanlah perkara mudah untuk melihat aspek tersebut. Keberagaman pemikiran tiap masyarakat serta sikap yang terkadang bisa di politisasi oleh pihak lain menjadi sebuah tantangan sendiri dalam menjawab problema kebijakan politik di Indonesia. Belum lagi istilah "*anak tiri*" yang disandangkan terhadap daerah-daerah yang belum mendapat perhatian penuh dari pemerintah pusat sehingga melahirkan sikap kecemburuan yang sangat berbahaya dalam masyarakat yang pada satu titik bisa terjadi pemberontakan.

Mengutip pendapat Kuntowijoyo, Indonesia harus memiliki pendidikan politik dalam memahami dan menjawab segala persoalan politik serta adanya Jihad melawan politik dalam artian bahwa bukan menentang politik tapi melawan nafsu politik untuk mendapatkan kekuasaan dan mencoba untuk berdemokrasi dengan membagi kekuasaan (*power sharing*) yang menjadi demokrasi politik. (Kuntowijoyo, 1999: 210)

Kebutuhan Indonesia sebenarnya berada pada sebuah keharmonisan semua elemen bangsa tanpa terkecuali. Baik dalam kalangan pemerintah, masyarakat, akademisi, ulama serta kalangan pemikir kemajuan bangsa harus memiliki sinergisitas dalam mengolah Indonesia secara bersama serta menyatukan keharmonisan terhadap kebutuhan bangsa. System demokrasi yang dianut Indonesia sekarang sangat membutuhkan hal tersebut. Dalam pandangan Nurcholis Madjid, demokrasi itu mustahil akan berjalan baik tanpa terciptakan kesalinghormatan di kalangan elit bangsa dan di kalangan seluruh masyarakat. (Nurcholis Madjid, 1995: 90)

### **Islam, Pancasila dan KeIndonesiaan**

Polemik di Indonesia memang sudah dimulai sejak awal terbentuknya negara ini, terutama yang menjadi landasan dasar dari negara. Pancasila yang kita hafal sekarang dengan lima nilai inti didalamnya menjadikan pondasi dasar dari Indonesia. Polemik terhadap pancasila juga terus bermunculan terutama yang berkaitan dengan konsep Islam. Secara sekilas sebenarnya pancasila mengandung unsur Islam yang sangat kental sehingga tergambar citra Islam di dalam pancasila memang bisa diwakilkan oleh umat non-islam lainnya. Ini dikarenakan kemajemukan Indonesia yang beragam serta terdiri berbagai suku, ras, budaya dan agama, namun Islam tetaplah mendominasi dari semua itu. Maka perlu adanya konsep yang baik di Indonesia sebagai citra Islam yang sebenarnya.

Islam dan pancasila adalah dua hal yang berbeda yang tidak bisa disamakan. Islam merupakan agama sedangkan pancasila merupakan ideology negara Indonesia yang lahir dari sejarah bangsa Indonesia sendiri. Perlu pemahaman yang baik dari kedua aspek tersebut. Kuntowijoyo menguraikan bahwa Islam dan sila-sila dalam pancasila tidak bertentangan jika dilihat dari hakikat keduanya, hanya saja kenyataan sejarah dapat saja keduanya dipertentangkan terutama untuk melayani kepentingan-kepentingan kelompok sosial. (Kuntowijoyo, 1999: 85) Kekhawatiran yang muncul sebenarnya adalah jika pancasila

ini menjadi sebuah agama sehingga bisa merusak agama-agama yang ada di Indonesia terutama Islam sendiri yang pada dasarnya menjadi mayoritas di Indonesia sendiri.

Memandang Indonesia sekarang haruslah kearah positif yang harus mampu membangun segala sendi-sendi utama sebagai negara baik aspek pendidikan, agama, budaya serta ekonomi untuk menunjang memakmurkan serta kesejahteraan di Indonesia. Islam dan Pancasila jangan dijadikan polemic namun harus bisa menjadi implikasi dalam membangun konsep negara yang berIslami serta pilar-pilar keislaman tergambar di wajah Indonesia tanpa memaksakan nama Islam dalam Ideologi negara. Samir Aliyah juga menguraikan bahwa penegakan keadilan, penerapan musyawarah, merealisasikan persamaan serta komitmen terhadap akhlak yang mulia yang dijadikan sebagai pilar-pilar negara Islam. (Samir Aliyah, 2004: 96-128) Pilar-pilar tersebut, idealnya harus diterapkan di Indonesia sehingga tanpa melebelkan diri dalam negara Islam pun Indonesia telah menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan bernegara serta dapat menghidupkan sebuah konsep negara yang *baladun toyyibatun wa rabbun ghofur*.

## PENUTUP

Indonesia sebagai salah satu pemeluk Islam terbesar harus memiliki landasan utama keislaman sebagai ciri dari keIndonesiaan. Ini tergambar dari rentetan sejarah Indonesia yang tidak bisa dipisahkan dari Islam. Kondisi ini menuntut Indonesia harus memiliki nuansa keIslaman baik dari aspek kepemimpinan dan juga aspek kebijakan politik yang berlandaskan Islam. Tanpa perlu slogan Islam, namun perlu adanya implementasi nyata konteks islam di Indonesia. Secara sekilas sudah tergambar Islam dalam ranah keindonesiaan namun masih jauh dari aspek implementasi nyatanya. Maka perlu adanya kebijakan politik Islam yang bisa diadopsi dengan baik dalam penetapan dan pembentukan suatu kebijakan bangsa sehingga aspek kepemimpinan juga tersentuh dalam setiap kebijakan yang di buat serta terhindar dari praktik komunisme dan juga kapitalisme yang masih ada di Indonesia yang terkadang mengikis ciri keindonesiaan sebenarnya.

Pancasila yang menjadi ideology bangsa Indonesia harus berada pada poros terdepat dalam menuangkan nilai-nilai politik pada kebijakan yang dibuat serta Islam harus menjadi nilai utama dalam mengukur segala kebijakan yang akan dibuat. Nilai-nilai keislaman serta komparasi nilai-nilai Pancasila harus menjadi pilar pembersatu keindonesiaan yang mampu melibatkan segala lapis masyarakat membangun nilai kemajemukan Indonesia tanpa menciderai aspek Islam dan juga Pancasila yang menjadi pilar penting di Indonesia. Indonesia sebagai negara besar dengan ranah keislaman yang muncul bisa memiliki identitas serta komitmen Islam baik dalam ranah pemerintahan serta dalam lingkungan masyarakatnya sehingga lahirnya suatu situasi dan nuansa baru di Indonesia dalam membangun sebuah kemajuan dan mampu bersaing dalam skala Internasional dan bisa memberi pengaruh dalam skala Internasional.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

Al-Quranul Karim

Afifi, Abdullah A, and Afifi Fauzi Abbas, Islam, Wacana Negara Dan Geliat Politik Di Indonesia". *Perwakilan: Journal of Good Governance, Diplomacy, Customary Institutionalization and Social Networks* 1 (August), 2023. <https://doi.org/10.58764/j.prwkl.2023.1.37>.

Ahmad Syafi'i Maarif, Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan; Sebuah Refleksi Sejarah. Bandung: Mizan, 2009.

Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Variasi Kontemporer, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007.

H. A. Djazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah, 2013

J. Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, Cet III, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.

Kuntowijoyo, Identitas Politik Umat Islam, Bandung: Mizan, 1999.

M. Hasbi Amiruddin, Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman, Yogyakarta: UII Press, 2000.

M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005.

Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung : Pustaka Setia, 2011.

Muhammad Yusuf Musa, Nidalamul Hukmi Fil Islam, Kairo: Darul Kitab al-Araby, cet. II.

Mujar Ibnu Syarif dan Khamani Zada, Fiqh Siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam, Jakarta: Erlangga, 2007.

Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, Jakarta: UI-Press, 1993.

Nurcholish Madjid, Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan, Bandung: Mizan, 1995.

Samir Aliyah, Sistem Pemerintahan, Peradilan dan Adat dalam Islam, Jakarta Timur: Khalifa, 2004.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, cet. ke-3, 2021.